



2020

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I



Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

**LBMN I -222/PW07/1/2020
Tanggal 10 Juli 2020**

**PERWAKILAN
BPKP PROVINSI
SUMATERA
SELATAN**



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Laporan Barang Milik Negara
Semester I
Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020

Jalan Bank Raya 2, Demang Lebar Daun
Palembang

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan BMN dengan menyusun Laporan BMN berupa Laporan Posisi BMN di Neraca dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

Penyusunan Laporan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan BMN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Disamping itu, Laporan BMN ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palembang, 10 Juli 2020

Kepala Perwakilan,



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA	
A. PENDAHULUAN	1
1. Dasar Hukum	1
2. Entitas Pelaporan	2
3. Periode Laporan	3
B. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	3
1. Kapitalisasi	3
2. Penyusutan Aset Tetap	4
C. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN	5
D. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA	6
1. Saldo Awal	6
2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara	6
3. Barang Milik Negara Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020	17
E. INFORMASI BMN LAINNYA	20
1. Perkembangan Nilai BMN	20
2. Informasi Pengelolaan BMN	20
3. BMN dari Dana Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan	20
4. BMN pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum	21
5. BMN dari Dana Belanja Lain-lain	21
6. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang	21
7. BMN berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)	21
LAMPIRAN	
LAPORAN POSISI BMN DI NERACA	
LAPORAN BARANG PERSEDIAAN	
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA <i>INTRAKOMPTABEL</i>	
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA <i>EKSTRAKOMPTABEL</i>	
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA GABUNGAN	
LAPORAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
LAPORAN ASET TAK BERWUJUD	
LAPORAN BARANG BERSEJARAH	
LAPORAN PENYUSUTAN	
LAPORAN BARANG HILANG	
LAPORAN BARANG RUSAK BERAT	
LAPORAN BPYBDS	
BERITA ACARA REKONSILIASI (DJKN)	
BERITA ACARA REKONSILIASI (KPKNL)	

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.06/2014 Perubahan Ketiga atas PMK No 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 125 /PMK.06/2011 tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari Dana DK/TP sebelum TA 2011;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 /PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK 1 /PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua ;

- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.06/2015 tentang Modul Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pemerintah Pusat;
- r. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- s. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/ Lembaga;
- t. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- u. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-52/KN/2014 hal Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penyusutan BMN, dan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2014.

2. Entitas pelaporan

Dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (BMN), Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk Unit Akuntansi Barang. Unit Akuntansi Barang terdiri dari:

- a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB),
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1),
- c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), dan
- d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

UAPB merupakan unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Barang) dengan penanggungjawab Menteri/Pimpinan Lembaga. UAPPB-E1 merupakan unit akuntansi pada tingkat eselon I dengan penanggungjawab pejabat eselon I. UAPPB-W merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPB instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga di wilayahnya dengan penanggungjawab Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Satuan Kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W. Sedangkan UAKPB merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang memiliki wewenang menguasai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penanggungjawab Kepala Satuan Kerja.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan unit akuntansi dengan fungsi rangkap. Dengan kata lain, selain sebagai UAKPB, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan juga merupakan UAPPB-W yang memiliki wewenang menguasai BMN di lingkungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dan disajikan untuk periode Semester I TA 2020 (periode yang berakhir 30 Juni 2020).

B. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

1. Kapitalisasi

Laporan BMN ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan dan penyajian Laporan BMN Semester I Tahun 2020 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

2. Penyusutan Aset Tetap

Penyusunan Laporan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Semester I Tahun Anggaran 2020 sudah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap dengan beberapa ketentuan dasar:

- a. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- b. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 30 Juni 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 30 Juni 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- e. Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2014 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

C. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Periode Semester I Tahun 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Nilai BMN gabungan (*intrakomptabel* dan *ekstrakomptabel*) yang disajikan pada periode Semester I Tahun 2020 ini adalah sebesar Rp124.294.039.170,00 (Seratus dua puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama periode Semester I Tahun 2020 terdapat mutasi tambah dan kurang.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non keuangan merupakan transaksi penambahan dan/atau pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca
2. Laporan Barang Persediaan
3. Laporan Aset Tetap (*Intrakomptabel*, *Ekstrakomptabel*, dan Gabungan)
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
5. Laporan Aset tak Berwujud
6. Laporan Barang Bersejarah
7. Laporan Kondisi Barang (Untuk Tahunan)
8. Laporan Penyusutan
9. Laporan Barang Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang
10. Laporan Barang Rusak Berat yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara
13. Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAK-SIMAK pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

D. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2020

1. Saldo Akhir

Nilai BMN per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp124.294.039.170,00 Jumlah ini terdiri dari nilai BMN *intrakomptabel* (nilai BMN yang disajikan di Neraca) sebesar Rp124.293.552.170,00 dan nilai BMN *ekstrakomptabel* sebesar Rp487.000,00.

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

a. Persediaan

Saldo Persediaan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 sebesar Rp448.364.926,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp556.871.662,00 dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp108.506.736,00 jumlah tersebut dapat dirinci:

Kode	Akun	Saldo Awal	Saldo Akhir	Mutasi
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) - (4)
117111	Barang Konsumsi	Rp514.715.070	Rp416.529.766	Rp(98.185.304)
117113	Barang untuk Pemeliharaan	Rp20.263.972	Rp9.960.430	Rp(10.303.542)
117114	Suku Cadang	Rp0	Rp0	Rp 0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	Rp0	Rp0	Rp 0
117131	Bahan Baku	Rp0	Rp0	Rp 0
117199	Persediaan Lainnya	Rp21.892.620	Rp21.874.730	Rp(17.890)
	Jumlah	Rp556.871.662	Rp448.364.926	(Rp108.506.736)

Tidak terdapat barang persediaan yang dalam kondisi rusak berat dan usang.

b. Tanah

Saldo Tanah pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 Rp95.028.719.000,00 untuk 21.873 M²/ 14 persil. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal nilai sebesar Rp98.776.366.000,00 untuk 21.873 M² / 14 persil Terdapat mutasi kurang pada kelompok barang ini dengan nilai sebesar Rp3.747.647.000,00 / karena adanya revaluasi penilaian BMN Tahun 2019.

Tidak terdapat tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

c. Peralatan & Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 adalah sebanyak 2.415 unit sebesar Rp6.937.585.635,00 Jumlah

tersebut berasal dari saldo awal sebanyak 2.392 sebesar Rp6.758.396.895,00 terdapat mutasi tambah pada kelompok ini sebanyak 23 unit dengan nilai sebesar Rp179.188.740,00.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) **3.01. Alat Bantu**

Saldo Alat Bantu berupa alat besar Genset dan Water Pump pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 adalah sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar Rp360.886.502,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar Rp360.886.502,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini untuk periode Semester I Tahun 2020.

Tidak terdapat Alat Bantu (alat besar) yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Alat Bantu berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	5 Unit	Rp360.886.502,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada kelompok Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2) **3.02. Alat Angkutan**

Saldo Alat Angkutan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 adalah sebanyak 13 unit dengan nilai sebesar Rp1.286.994.100,00, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 11 Unit dengan nilai sebesar Rp1.247.394.100,00. Terdapat mutasi tambah pada kelompok ini sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp.39.600.000,00.

Jumlah alat angkut kendaraan roda empat berupa minibus sebanyak 7 unit dengan nilai sebesar Rp1.147.290.000,00, sedan 1 unit dengan nilai sebesar Rp65.120.000,00 dan jumlah kendaraan roda dua sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar Rp 74.584.100,00.

Tidak terdapat Alat Angkutan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Alat Angkutan berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	7 Unit	Rp 1.147.290.000
Baik	1 Unit	Rp 65.120.000
Rusak Ringan	5 Unit	Rp 74.584.100
	13 unit	Rp 1.286.994.100

Tidak terdapat pada kelompok Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah / Penghapusan BMN

3) **3.03. Alat Bengkel & Alat Ukur**

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp550.000,00, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp550.000,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini untuk periode Semester I tahun 2020.

Tidak terdapat Alat Bengkel dan Alat Ukur yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Alat Bengkel dan Alat Ukur berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	1 Unit	Rp 550.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada kelompok Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

4) **3.04. Alat pertanian**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki saldo Alat Pertanian.

5) **3.05. Alat Kantor & Alat Rumah Tangga**

Saldo Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 adalah sebanyak 2.049 unit dengan nilai sebesar Rp2.740.838.847,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2.048 unit dengan nilai sebesar Rp2.738.528.847,00

Terdapat mutasi tambah dan pada kelompok barang ini untuk periode Semester I tahun 2020 sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp2.310.000,00.

Tidak terdapat Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Rincian data Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	2.049 Unit	Rp2.740.838.847,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak terdapat kelompok Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

6) **3.06. Alat Studio, Komunikasi, & Pemancar**

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 adalah sebanyak 70 unit dengan nilai sebesar Rp546.179.788,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 70 unit dengan nilai sebesar Rp546.179.788,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan pada kelompok barang ini.

Tidak terdapat Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	70 unit	Rp 546.179.788,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada kelompok Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

7) **3.07. Alat Kedokteran & Kesehatan**

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 adalah sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp7.616.500,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 4 unit dengan nilai sebesar Rp2.164.000,00. Terdapat mutasi tambah pada kelompok barang ini sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp5.452.500,00.

Tidak terdapat Alat Kedokteran dan Kesehatan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak ada proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Alat Kedokteran dan Kesehatan berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	6 unit	Rp 7.616.500,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak terdapat kelompok Alat Kedokteran dan Kesehatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

8) **3.08. Alat Laboratorium**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki saldo Alat Laboratorium.

9) **3.09. Alat Persenjataan**

- Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki saldo Alat Persenjataan.

10) **3.10. Komputer**

Saldo Komputer pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 adalah sebanyak 270 dengan nilai sebesar Rp1.994.220.898,00 jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 252 unit dengan nilai sebesar Rp1.862.394.658,00. Terdapat mutasi tambah dan pada kelompok barang ini untuk periode Semester I tahun 2020 sebanyak 18 unit dengan nilai sebesar Rp131.826.240,00.

Rincian data Komputer Sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
P.C. Unit	99	775.778.920,00
Note Book Acer	60	580.665.490,00
Printer	76	185.357.530,00
Lap Top	4	55.297.000,00
Scanner	15	85.675.200,00
Local Area Network (LAN)	3	98.603.016,00
Peralatan Mini Komputer	5	5.087.500,00
CPU	2	4.817.000,00
External	1	660.000,00
Server	1	54.150.862,00
Router	1	53.222.059,00
Hub	2	43.905.646,00
Firewall	1	51.000.675,00
Jumlah	270	1.994.220.898,00

Tidak terdapat Komputer yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak ada proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Komputer berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	252 Unit	Rp1.903.249.398,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat P.C	2 Unit	6.069.000,00
Rusak Berat Printer	9 Unit	22.330.000,00
Rusak Berat Note Book	7 Unit	62.572.500,00

Terdapat 2 P.C unit yang rusak berat dengan nilai sebesar Rp6.069.000,00, 9 unit Printer yang rusak berat dengan nilai sebesar Rp22.330.000,00 dan 7 unit Note Book yang rusak berat dengan nilai sebesar Rp62.572.500,00

11) 3.11. Alat Eksplorasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki saldo Alat Eksplorasi.

12) 3.12. Alat Pengeboran.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki saldo Alat Pengeboran.

13) 3.13. Alat Produksi, Pengolahan, & Pemurnian

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki saldo Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian.

14) 3.14. Alat Bantu Eksplorasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki saldo Alat Bantu Eksplorasi.

15) 3.15. Alat Keselamatan Kerja

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki saldo Alat Keselamatan Kerja.

16) 3.16. Alat Peraga

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki saldo Alat Peraga.

17) 3.17. Peralatan Proses/Produksi

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki saldo Peralatan Proses/Produksi.

18) 3.18. Rambu-rambu

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki saldo Rambu-rambu.

19) 3.19. Peralatan Olahraga

Saldo Peralatan Olahraga pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp299.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp299.000,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini untuk periode Semester I tahun 2020.

Tidak terdapat Peralatan Olahraga yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Tidak ada yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Peralatan Olahraga berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	1 Unit	Rp 299.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada kelompok Peralatan Olahraga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

20) Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp6.067.214.651,00, terdiri dari nilai BMN *intrakomptabel* (nilai BMN yang disajikan di Neraca) sebesar Rp6.066.727.651,00, Nilai penyusutan BMN *ekstrakomptabel* Mutasi kurang akumulasi penyusutan sebesar sebesar Rp487.000,00,.

d. Gedung & Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Perwakilan BPKP Provinsi Per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp21.679.810.535,00, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp21.653.685.535,00,

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang:

1) 4.01. Bangunan Gedung

Saldo Bangunan Gedung pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 adalah sebanyak 65 unit dengan nilai Rp21.679.810.535,00, Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 65 unit dengan nilai sebesar Rp21.653.685.535,00, Terdapat mutasi tambah dan pada kelompok Gedung dan Bangunan ini untuk periode Semester I tahun 2020 sebanyak 1 unit rumah negara dengan nilai sebesar Rp26.125.000,00. Tidak terdapat Bangunan Gedung yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	55 Unit	Rp21.419.674.360,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	10 Unit	Rp 260.136.175,00

Saldo Bangunan Gedung pada posisi 30 Juni 2020 sebesar Rp21.679.810.535,00 terdapat rumah negara statusnya yang dihentikan dari penggunaannya sebanyak dari 10 unit lokasi di Komplek Seduduk Putih dengan nilai sebesar Rp260.136.175,00.

2) **4.02. Monumen**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki saldo Monumen.

3) **4.03. Bangunan Menara**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki saldo Bangunan Menara.

4) **4.04. Tugu Titik Kontrol/Pasti**

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 adalah sebanyak 11 unit dengan nilai sebesar Rp916.500.575,00 jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp.916.500.575,00 Tidak terdapat mutasi tambah pada kelompok barang ini.

Tidak terdapat Tugu Titik Kontrol/Pasti yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Tugu Titik Kontrol/Pasti berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	11 Unit	Rp916.500.575,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada kelompok Tugu Titik Kontrol/Pasti yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

5) **Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan**

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.179.784.035,00 jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.837.903.348,00, mutasi kurang oleh akumulasi penyusutan sebesar Rp341.880.687,00.

e. **Jalan, Irigasi, dan jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp569.037.000,00 Jumlah tersebut terdiri

dari saldo awal sebesar Rp569.037.000,00 Tidak terdapat mutasi tambah pada kelompok barang ini.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang kelompok barang.

1) **5.01. Jalan & jembatan**

Saldo Jalan dan Jembatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 adalah sebanyak 5,263 m2 dengan nilai sebesar Rp557.943.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 5,263 m2 dengan nilai sebesar Rp557.943.000,00 Tidak terdapat mutasi tambah pada kelompok barang ini. Tidak terdapat Jalan dan Jembatan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak ada proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Jalan dan Jembatan berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	5,263 M2	Rp 557.943.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak terdapat kelompok Jalan dan Jembatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2) **5.02. Bangunan Air**

Saldo Bangunan Air pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 adalah sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp11.094.000,00.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp11.094.000,00.

Tidak terdapat mutasi tambah kelompok barang ini.

Tidak terdapat Bangunan Air yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak terdapat prose penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Bangunan Air berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	6 Unit	Rp 11.094.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak terdapat kelompok Bangunan Air yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

3) **5.03. Instalasi**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki saldo Instalasi.

4) **5.04. Jaringan**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki saldo Jaringan.

5) **Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi**

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp449.499.089,00, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp412.711.074,00 dan mutasi kurang oleh akumulasi penyusutan sebesar Rp36.788.015,00-

f. **Aset Tetap Lainnya**

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 adalah sebanyak 1.447 buah sebesar Rp78.400.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp78.400.000,00, tidak terdapat mutasi kurang pada kelompok barang ini.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut.

1) **6.01. Bahan Perpustakaan**

Saldo Bahan Perpustakaan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 adalah sebanyak 1.446 unit dengan nilai sebesar Rp63.050.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1.446 unit dengan nilai sebesar Rp63.050.000,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini.

Dari jumlah/nilai Bahan Perpustakaan di atas, tidak terdapat Bahan Perpustakaan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Tidak ada yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Bahan Perpustakaan berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	1.446 unit	Rp63.050.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak terdapat kelompok Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2) **6.02. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 adalah sebanyak 1 unit

dengan nilai sebesar Rp15.350.000,00, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp15.350.000,00.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini.

Dari jumlah/nilai Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga di atas, tidak terdapat Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak ada yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	1 unit	Rp15.350.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak terdapat kelompok Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

3) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp15.350.000,00

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki KDP.

h. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 adalah sebanyak 33 unit dengan nilai Rp18.503.000,00,.

1) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

2) 8.01. Aset Tak Berwujud

Saldo Peralatan Aset Tak Berwujud pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 adalah sebanyak 33 unit dengan nilai sebesar Rp18.503,00,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 33 unit dengan nilai sebesar Rp18.503.000,00.

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	33 unit	Rp18.503.000,00
Rusak Ringan	-	-

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Rusak Berat	-	-

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp59.251.500,00, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp44.438.625,00 dan mutasi kurang oleh akumulasi penyusutan sebesar Rp14.812.875,00.

3) BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki saldo Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah.

4) BMN Berupa Aset Bersejarah

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki BMN Berupa Aset Bersejarah.

3. BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020

a. BMN Per Akun Neraca

Nilai BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp124.294.039.170,00. Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian:

Neraca	Intrakompabel (Rp)	Ektrakompabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Aset Lancar			
Persediaan	448.364.926	0	448.364.926
Sub Jumlah A	448.364.926	0	448.364.926
Aset Tetap			
Tanah	95.028.719.000	0	95.028.719.000
Peralatan & Mesin	6.937.585.635	487.000	6.938.072.635
Gedung & Bangunan	21.679.810.535	0	21.679.810.535
Jalan dan Jembatan, Irigasi	569.037.000	0	569.037.000
Aset Tetap Lainnya	78.400.000	0	78.400.000
KDP	0	0	0
Sub Jumlah B	124.293.522.170	487.000	124.294.009.170
Aset Lainnya			
Kemitraan dengan Pihak	0	0	0

Neraca	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Ketiga			
Aset Tak Berwujud	118.503.000	0	118.503.000
Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Ops. Pemerintah	0	0	0
Sub Jumlah C	118.503.000	0	0
Total	124.860.420.096	487.000	124.860.907.096

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 per Perkiraan Neraca:

Neraca	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Aset Tetap			
Peralatan & Mesin	6.066.727.651	487.000	6.067.214.651
Gedung & Bangunan	2.179.784.035	0	2.179.784.035
Jalan, Irigasi, & Jaringan	449.499.089	0	449.499.089
Aset Tetap Lainnya	15.350.000	0	15.350.000
Aset Tak Berwujud	0	0	
KDP	0	0	0
Sub Jumlah A	8.711.360.775	487.000	8.711.847.775
Aset Lainnya			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
Aset Tak Berwujud	59.251.500	0	59.251.500
Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0	0
Sub Jumlah B	59.251.500	0	59.251.500
Total	8.770.612.275	487.000	8.711.099.275
Aset Lainnya			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0	0
Sub Jumlah B	0	0	0
Total	8.770.612.275	487.000	8.711.099.275

b. Perbandingan Nilai BMN pada laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam Laporan Barang (SIMAK-BMN) dan Laporan Keuangan (SAKPA) pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 per akun Neraca adalah:

Neraca	Laporan Barang (Rp)	Laporan Keuangan (Rp)	Selisih (Rp)
Persediaan	448.364.926	448.364.926	0
Tanah	95.028.719.000	95.028.719.000	0
Peralatan & Mesin	6.937.585.635	6.938.072.263	487.000
Gedung & Bangunan	21.679.810.535	21.679.810.535	0
Jalan, Irigasi, & Jaringan	569.037.000	569.037.000	0
Aset Tetap Lainnya	78.400.000	78.400.000	0
KDP	0	0	0
Aset Tak Berwujud	118.503.000	118.503.000	0
Aset Lain-lain *)	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	(8.770.612.275)	(8.770.612.275)	0
Total	116.089.807.821	116.090.294.821	487.000

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, terdapat selisih penyajian nilai BMN antara Laporan Barang dan Laporan keuangan sebesar Rp487.000,00 terjadi pada barang *ekstrakomptabel* yang tidak tercatat di neraca SAKPA.

E. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (*intrakomptabel* dan *ekstrakomptabel*) selama lima periode terakhir, dapat disajikan:

Periode	Nilai BMN	Perkembangan	
		Rupiah	Persen
2015	Rp 43.560.309.591	Rp 1.171.080.369	2,763 %
2016	RP 39.778.623.541	RP (3.718.686.000)	(8,681 %)
2017	RP 120.309.647.551	RP 80.531.024.010	202,448 %
2018	RP 126.382.278.250	RP 6.072.630.699	5,0475%
2019	RP124.088.725.430	RP2.293.552.890	1,82 %
2020	RP124.294.039.170	RP205.531.374	1,65 %

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan

Nilai BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2020 dengan nilai sebesar Rp.124.294.039.170,00 sudah ditetapkan status

penggunaannya sebesar Rp124.144.850.430,00 dan aset alat kantor dan rumah tangga yang belum ditetapkan sebanyak 23 unit sebesar Rp179.188.740,00

	Uraian	Sudah Ditetapkan	Belum Ditetapkan/ Dalam Proses
	1	2	3
	Tanah	Rp95.028.719.000	Rp0
	Peralatan & Mesin	Rp6.937.585.635	Rp179.188.740
	Gedung & Bangunan	Rp21.679.810.535	Rp0
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp569.037.000	Rp0
	Aset Tetap Lainnya	Rp78.400.000	Rp0
	Asset Tak Berwujud	Rp.118.503.000,00	
	Jumlah	Rp124.144.850.430	Rp179.188.740

Pengusulan penetapan status pengguna alat kantor dan rumah tangga dilakukan pada Semester I tahun 2020

b. Pengelolaan BMN Idle

Uraian	Jumlah
Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN idle	0 Unit
Ditetapkan sebagai BMN idle oleh Pengelola	0 Unit
Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh Pengelola	0 Unit
Telah diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan dari Pengguna	0 Unit
Selesai serah terima kepada Pengelola	0 Unit

3. BMN dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

4. BMN pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki satuan kerja Badan Layanan Umum.

5. BMN Dari Dana Belanja Lain-lain (BA 999)

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak mengelola BMN yang berasal dari Dana Belanja Lain-lain (BA 999).

6. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

a. Daftar Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki Daftar barang hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.

b. Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak memiliki BMN dengan kondisi rusak berat yang belum diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.

7. **BMN berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)**
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2020 tidak mengelola BMN berupa BPYBDS.
8. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan Lelang kendaraan roda 4 empat sebanyak 2 Unit dengan Nilai Buku Rp45.798.000,00 pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 di Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Palembang Jl. Kapten A Rivai Nomor 4 Gedung Keuangan Negara Palembang